

PENGARUH PERAN SATUAN PENGAWASAN INTERN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TINGKAT PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO) /BTDC

Marcelinus Sangap Nauli Radjagukguk¹

I Wayan Ramantha²

Ni Putu Sri Harta Mimba³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail:balimarcel@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian di PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) /BTDC. Tujuan studi untuk mengetahui pengaruh peran Satuan Pengawasan Intern dan Peran Komite Audit terhadap Tingkat Penerapan *Good Corporate Governance*. Sampel menggunakan jenis sampel tanpa peluang (*non-probability sampling*), teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, dan jumlah data sebanyak 20 responden. Metode statistik menggunakan regresi berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Satuan Pengawasan Intern dan peran Komite Audit terhadap tingkat penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan dan positif, peran Satuan Pengawasan Intern terhadap tingkat penerapan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh, dan peran Komite Audit terhadap tingkat penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan dan positif.

Kata kunci: Satuan Pengawasan Intern, Komite Audit, *Good Corporate Governance*, BTDC

ABSTRACT

Research was conducted in PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) /BTDC. Study aims to know the influence of the Internal Audit's role and the Audit Committee's role on the implementation level of Good Corporate Governance. Study uses a non-probability sampling type, purposive sampling technique methods, and as much data as 20 respondents. Statistical methods used were multiple regressions. The results of study concludes that Internal Audit's role and Audit Committee's role on the implementation level of Good Corporate Governance have a significant and positive effect, the role of Internal Audit against the implementation level of Good Corporate Governance does not have effect, and the role of the Audit Committee on the implementation level of Good Corporate Governance have a significant and positive effect.

Keywords: Internal Audit, Audit Committee, Good Corporate Governance, BTDC

PENDAHULUAN

Menurut Tjager (2003) dan Arafat (2008), menciptakan kondisi *corporate governance* (CG) yang baik memberikan banyak manfaat sebagai berikut (1) meningkatnya ketertarikan investor untuk berinvestasi dalam perusahaan dalam artian

akan mempermudah akses pembiayaan, dikarenakan juga adanya kebijakan lembaga-lembaga keuangan besar dalam membiayai perusahaan melalui pinjaman atau ekuitas telah mensyaratkan kondisi CG di perusahaan tersebut atau dapat dikatakan bahwa perusahaan yang telah menerapkan CG akan memiliki akses yang lebih baik untuk modal internasional daripada perusahaan yang tidak atau belum menerapkan CG; (2) dengan adanya CG juga akan bisa menarik sumber daya manusia terbaik untuk mau kerja di perusahaan itu, serta akan dapat meningkatkan kualitas perusahaan, dan (3) selain itu praktik CG mencakup juga perlindungan hak pemegang saham, manajemen resiko yang sehat dan peningkatan pengungkapan serta transparansi keuangan.

Pengamatan data empirik yang menunjukkan (1) *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia masih berada pada posisi 10 di ASEAN (Daniri, 2012); (2) Sebagian BUMN masih diragukan kemampuannya untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik mengingat kondisi sebagian BUMN yang memprihatinkan seperti dinyatakan Ibrahim (2007:5-14) dan Faizal (2002:4,108) sebagai berikut praktik pengelolaan BUMN dipersepsikan oleh publik sebagai perusahaan yang sangat tidak efisien dan sangat tidak efektif dan korupsi-kolusi; (3) beberapa persero tidak menghasilkan keuntungan, melainkan menderita kerugian sehingga negara harus menambah modalnya (Yasin, 2012). Kerugian ini mengindikasikan persero belum dikelola secara baik dan profesional.

Alasan mengapa itu penting diteliti adalah (1) perusahaan yang sebelumnya berkinerja 'excellent/baik sekali' apabila tidak menjalankan GCG dengan baik, bisa berujung pada kehancuran perusahaan. Sebagai contoh adalah kasus Enron yang merupakan perusahaan raksasa bisnis yang hancur gara-gara manipulasi laporan keuangan. Suatu fakta lagi yang bisa dijadikan pembenaran bahwa untuk menjadi perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang Tbk (terbuka). Dengan Tbk, perusahaan akan didorong untuk melakukan GCG, kalau tidak mau harga saham mereka anjlok dengan sendirinya karena sangat dipengaruhi oleh kepercayaan shareholders; (2) Buruknya kondisi sebagian BUMN yang berbentuk persero tentu patut disayangkan karena mengakibatkan tujuan persero belum tercapai dengan baik.

Buruknya kondisi persero mengindikasikan prinsip-prinsip GCG belum diterapkan dengan baik. (3) melalui upaya penerapan GCG, diharapkan BUMN khususnya yang berbentuk persero dapat menjalankan perannya secara optimal yang memberikan manfaat atau kontribusi bagi keuangan negara. BUMN yang berbentuk persero memiliki tujuan utama mengejar keuntungan, diharapkan dapat menjalani perannya dan mencapai tujuannya dengan baik untuk kontribusi keuangan negara. Ironisnya kondisi beberapa persero masih cukup memprihatinkan dan justru menjadi beban bagi keuangan negara, maka BUMN perlu dikelola dengan efektif dan efisien berlandaskan prinsip-prinsip GCG.

Keberadaan SPI pada BUMN di Indonesia berdasarkan PP No.3 Tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan BUMN bagian keempat pasal 45 dan UU No.19 Tahun 2003 pasal 67 bahwa setiap BUMN dibentuk SPI. SPI memiliki tugas membantu memberikan saran pemikiran kepada direksi dalam menjalankan pengawasan kegiatan operasi perusahaan, mencakup penggunaan sumber daya operasional serta sistem dan prosedur perusahaan. SPI juga dapat memberikan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi pengolahan unit usaha yang disajikan dalam bentuk laporan audit. Laporan hasil audit harus disertai rekomendasi perbaikan yang berguna untuk memberikan keyakinan bagi manajemen dalam mempertimbangkan tindakan korektif.

Tindak lanjut rekomendasi SPI sangat diperlukan agar perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan dapat terwujud. SPI merupakan komponen penting dalam *governance structure*, maka SPI diharapkan dapat melaksanakan pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian *fraud*. Pentingnya peran SPI yang dapat memberikan kontribusi yang positif pada keberhasilan pengelolaan BUMN.

Selain SPI, peran KA merupakan suatu organ terpenting yang disyaratkan dalam keputusan untuk mendukung implementasi GCG. Ketentuan tentang KA telah diatur juga dengan UU No.19 tahun 2003 pada pasal 70 bahwa komisaris BUMN wajib membentuk KA yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya. KA dibentuk dalam rangka

mengoptimalkan kinerja dewan komisaris, pengawasan yang optimal dari dewan komisaris akan membantu korporasi mengelola perusahaan dengan efisien dan efektif sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

Penelitian ini penting untuk diteliti di BTDC yang dilakukan secara sengaja (*purposive*) didasarkan beberapa pertimbangan yaitu: (1) merupakan satu-satunya BUMN di Bali; (2) BUMN ini telah memiliki SPI dan KA; (3) BUMN ini khusus menyediakan sarana dan prasana pariwisata yang dapat meningkatkan keuntungan yang dapat diperoleh atau dirasakan secara langsung oleh penduduk lokal, apalagi mengingat wisatawan yang tinggal di kawasan ini adalah *quality tourist* dengan daya beli (*buying power*) yang tinggi akan dapat memberikan hal yang positif bagi perkembangan taraf hidup di kawasan ini; dan (4) BUMN ini dapat memberikan citra di dunia internasional karena apabila BUMN ini menunjukkan kinerja dan reputasi pengelolaan perusahaan dengan baik dan benar karena memberikan citra kepercayaan bisnis internasional pada Bali dan Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: apakah peran SPI dan peran KA berpengaruh terhadap tingkat penerapan GCG pada BTDC?, apakah peran SPI berpengaruh terhadap tingkat penerapan GCG pada BTDC?, dan apakah peran KA berpengaruh terhadap tingkat penerapan GCG pada BTDC?

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran SPI dan peran KA terhadap tingkat penerapan GCG pada BTDC, untuk mengetahui pengaruh peran SPI terhadap tingkat penerapan GCG pada BTDC, untuk mengetahui pengaruh peran KA terhadap tingkat penerapan GCG pada BTDC.

Penelitian diharap dapat memberi manfaat praktis, yaitu memberi bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas peran SPI dan peran KA dalam penerapan GCG di perusahaan BUMN. Khusus bagi SPI, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran agar lebih mengoptimalkan pengawasannya, khususnya di bidang intern perusahaan, dan diharapkan lebih mengasah kemampuan agar lebih profesional dengan berpedoman pada standar profesional auditor intern dan

juga mentaati kode etik auditor intern. Agar keberadaan SPI ini dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam penyampaian hasil temuan auditnya seperti rekomendasi atau saran-saran yang mengarah pada perbaikan untuk perusahaan, harus bersifat korektif dan konstruktif juga harus bersifat *reasonable* atau mudah dimengerti agar ada proses timbal balik dari pihak perusahaan yaitu dapat mempertimbangkan dan menindak lanjuti hasil dari temuan audit yang dihasilkan. Juga bagi KA dapat mengetahui perannya dan sebagai pertimbangan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada penerapan GCG di perusahaan BUMN. Bagi investor dapat mengetahui tingkat penerapan GCG sebagai informasi untuk salah satu bahan pertimbangan keputusan investasi pada suatu perusahaan.

Manfaat akademik, yaitu memberikan gambaran umum mengenai pengaruh peran SPI dan peran KA pada penerapan GCG BUMN, dan menjadi bahan referensi atau tambahan informasi khususnya dalam perusahaan BUMN bagi peneliti berikutnya di masa yang akan datang yang tertarik pada penerapan GCG.

KAJIAN PUSTAKA

Istilah internal audit dalam BUMN dikenal dengan SPI berdasarkan PP No.3 Tahun 1983 dan UU No.19 Tahun 2003 pasal 67. Zarkasy (2008:103), peran internal audit berfungsi dan bertugas membantu direksi: (1) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan; (2) memperbaiki efektifitas proses pengendalian risiko; (3) melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan, dan (4) memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.

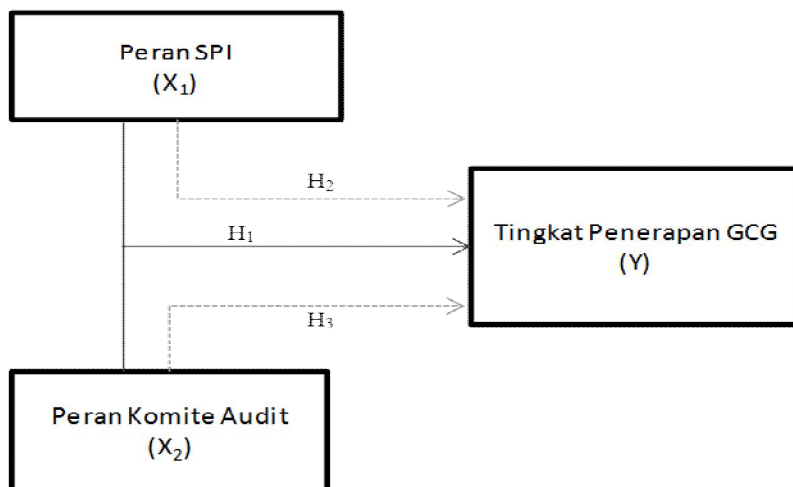
Komite Nasional *Good Corporate Governance* (2002:6) menyatakan peran KA itu adalah: (1) mengawasi proses pelaporan keuangan dan audit eksternal; (2) mengawasi proses resiko dan kontrol; (3) mengawasi proses GCG.

KNKG/Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) ada 5 (lima) prinsip yang tercantum di dalam Pedoman Umum GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Penelitian Gusnardi (2008:353-372) menyimpulkan bahwa audit internal secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *good corporate governance*.

Penelitian Sidharta dan Leonardo (2006:21-34) tentang komposisi komite audit dan keefektifannya juga menghubungkannya dengan praktik *good governance* di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa mayoritas pemegang saham merasa bahwa komite audit sebagai ancaman kontrol mereka dalam perusahaan, kekuasaan mereka seperti direktur untuk membatasi otoritas dan usaha dari komite audit. Faktor yang menyebabkan hal ini adalah karena sebagian besar perusahaan di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur model antar variabel-variabel untuk menguji peran SPI dan peran KA terhadap tingkat penerapan GCG pada gambar berikut:



Gambar 1
Struktur Model Antar Variabel

Hipotesis Penelitian

H₁: Terdapat pengaruh yang signifikan antara peran SPI dan peran KA terhadap tingkat penerapan GCG pada BTDC

H₂: Terdapat pengaruh yang signifikan antara peran SPI terhadap tingkat penerapan GCG pada BTDC

H₃: Terdapat pengaruh yang signifikan antara peran KA terhadap tingkat penerapan GCG pada BTDC

METODE PENELITIAN

Variabel-variabel penelitian adalah variabel bebas pertama (X_1) adalah peran SPI, variabel bebas kedua (X_2) adalah peran KA, dan variabel terikat (Y) adalah tingkat penerapan GCG. Jenis *sampling* dalam penelitian adalah sampel tanpa peluang (*non-probability sampling*), sample diambil dengan teknik *purposive-sampling* sehingga ukuran sampel dipilih direncanakan hanya berjumlah 20 responden saja agar informasi yang akan dikumpulkan tidak bias dan obyektif serta realistis, karena dengan kriteria atau kontrol yang ketat bahwa sampel yang dipilih adalah sampel yang hanya pada: (a) responden yang mengetahui atau menilai peran SPI dan peran KA dalam penerapan GCG di BUMN BTDC yakni dewan direksi, dewan Komisaris, sekretaris perusahaan, dan eksternal audit atau BPKP; dan (b) responden yang melaksanakan peran SPI dan peran KA atau pihak yang berhubungan dan berinteraksi erat dalam kerjasama dengan SPI dan KA, yakni SPI, KA, dan kepala divisi keuangan.

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang dimana responden cukup memberi tanda centang pada 5 (lima) skala yang disediakan. Kuesioner yang digunakan disusun berdasarkan indikator-indikator yang digunakan untuk melihat bagaimanakah peran SPI dan peran KA dalam penerapan GCG pada BUMN PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/BTDC.

Dalam pengujian kualitas data, menggunakan regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 16. Data dianggap memenuhi asumsi dan persyaratan analisis regresi berganda apabila data telah memenuhi kriteria uji asumsi klasik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Anova^b untuk uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	145.004	2	72.502	53.135	.000^a
	Residual	23.196	17	1.364		
	Total	168.200	19			

Sumber : Data diolah

Tabel 2
Coefficients^a untuk uji t dan teknik probabilitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.262	1.764		1.282	.217
	Peran SPI	.158	.102	.349	1.549	.140
	Peran KA	.293	.111	.598	2.650	.017

Sumber : Data diolah

Hipotesis Pertama

Berdasarkan Tabel Anova^b: (a) nilai $F_{hitung} = 53.135$ dan $F_{tabel} = 3.59$ ternyata $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya model regresi berganda dapat digunakan untuk memprediksi tingkat penerapan GCG yang dipengaruhi oleh peran SPI dan peran KA; dan (b) nilai dengan probabilitas $Sig\ 0.000 < 0.050$, artinya model regresi berganda dapat dipakai

untuk memprediksi tingkat penerapan GCG yang dipengaruhi oleh peran SPI dan peran KA.

Dari Tabel *Coefficients*^a menunjukkan bahwa model persamaan regresi berganda untuk memperkirakan tingkat penerapan GCG yang dipengaruhi peran SPI dan peran KA adalah: $Y = 2.262 + 0.158X_1 + 0.293X_2$ (Y = tingkat penerapan GCG, X_1 = peran SPI, dan X_2 = peran KA). Dari persamaan diatas diartikan jika tanpa adanya peran SPI dan peran KA (X_1 dan $X_2 = 0$), maka tingkat penerapan GCG hanya 2.262. Sedangkan bila masing-masing responden jawabannya bertambah 1 poin untuk jawaban peran SPI dan peran KA (X_1 dan $X_2 = 20$), maka diperkirakan tingkat penerapan GCG akan naik menjadi 11.282. Berdasarkan uji F, nilai F_{hitung} pada Tabel *Anova*^b adalah 53.135 sedangkan nilai F_{tabel} adalah 3.59 maka nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$. Uji hipotesis menunjukkan bahwa peran SPI dan peran KA berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat penerapan GCG.

Hipotesis Kedua

a. uji t, nilai t_{hitung} pada Tabel *Coefficients*^a adalah 1.549 sedangkan nilai t_{tabel} adalah 2.101 maka nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$.

Artinya tidak terdapat pengaruh antara peran SPI terhadap tingkat penerapan GCG pada BTDC.

b. teknik probabilitas, nilai *Sig* pada Tabel *Coefficients*^a adalah 0.140 sedangkan nilai $\alpha/2$ adalah 0.025 maka nilai *Sig* $> \alpha$.

Artinya tidak terdapat pengaruh antara peran SPI terhadap tingkat penerapan GCG pada BTDC.

Uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara peran SPI terhadap tingkat penerapan GCG. Berdasarkan jawaban responden terdapat sejumlah skor yang jawabannya kurang baik untuk indikator sebagai peran pertama, kedua, dan ketiga dari SPI yang dianggap cukup mempengaruhi perolehan keseluruhan penilaian peran SPI. Terutama peran SPI yang pertama yakni melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan dimana jumlah skor yang jawabannya kurang baik lebih banyak jumlahnya dibandingkan peran kedua dan ketiga, penulis dapat

memberikan pendapat bahwa ini disebabkan jumlah SDM dianggap kurang memadai sehingga pelaksanaan peran pertama SPI belum maksimal.

Hal tersebut tidak mendukung kajian teori yang dipaparkan Setianto (2004:22) dan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni Gusnardi (2008) yang menyatakan audit internal sangat mempengaruhi pelaksanaan GCG. Hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian sekarang tidak sama dikarena kondisi penelitian setempat yang berbeda

Hipotesis Ketiga

- a. uji t, nilai t_{hitung} pada Tabel *Coefficients^a* adalah 2.650 sedangkan nilai t_{tabel} adalah 2.101 maka nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara peran KA terhadap tingkat penerapan GCG pada BTDC.

- b. teknik probabilitas

Nilai *Sig* pada Tabel *Coefficients^a* adalah 0.017 sedangkan nilai $\alpha/2$ adalah 0.025 maka nilai $Sig < \alpha$.

Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara peran KA terhadap tingkat penerapan GCG pada BTDC.

Uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara peran KA terhadap tingkat penerapan GCG. Hal tersebut mendukung kajian teori yang dipaparkan Zarkasy (2008:22).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka simpulan dalam penelitian sebagai berikut: (a) terdapat pengaruh signifikan dan positif antara peran SPI dan peran KA terhadap tingkat penerapan GCG pada BTDC artinya bila SPI dan KA secara bersama berjalan efektif, maka pelaksanaan GCG di BTDC juga efektif. Peningkatan peran SPI dan KA akan juga meningkatkan pelaksanaan GCG di BTDC. (b) SPI secara mandiri tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan GCG di BTDC, artinya efektifitas

peran SPI tidak berhubungan langsung dengan penerapan GCG di BTDC. (c) terdapat pengaruh signifikan dan positif peran KA terhadap pelaksanaan GCG di BTDC, artinya pelaksanaan GCG di BTDC tidak dapat dipisahkan dengan peran KA. Semakin efektif KA berperan maka pelaksanaan GCG akan semakin baik.

Saran dalam penelitian ini (a) dikarenakan keterbatasan waktu dalam penelitian ini, penulis hanya bisa melakukan teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambah teknik pengumpulan data lainnya seperti wawancara secara struktur dan teknik dokumentasi misalnya piagam dan *job descriptions* untuk SPI dan KA diharapkan dapat melengkapi penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik, dan (b) bagi perseroan, disarankan SPI menambah personil SDM agar dalam melaksanakan perannya menjadi lebih optimal terutama pelaksanaan peran pertama SPI.

REFERENSI

- Astuti, Dewi Saptantinah Puji. 2010. Peran Internal Audit dan Komite Audit dalam Mewujudkan Good Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, vol. 8, no.1, April. hal: 1-9.
- Effendi, Muh. Arief. 2005. Peranan Komite Audit dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, vol: 1 no.1, Mei. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Departemen Keuangan R.I. hal. 51-57.
- Gusnardi. 2008. Analisis Faktor Audit Internal dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Ekuitas*, vol. 12, no. 3, September. hal. 353-372.
- Hery. 2004. Menuju Reposisi Peran Internal Audit dalam Era Globalisasi. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, vol. 4, no.3, Desember. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi (LPFE) Universitas Trisakti.
- Ibrahim, R. 2007. Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan. *Jurnal hukum bisnis*, vol. 26 no.1 tahun 2007. Jakarta. hal. 5-14.
- Jayanthi, Krishnan. 2005. Audit Committee Quality and Internal Control and Empirical Analysis. *The Accounting Review*, vol. 80, no.2. pp. 649-675.
- KNKG-Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman umum GCG Indonesia*. Jakarta.

- Lawrence J. Abbott, Susan Parker, Gary F. Peters, and K. Raghunandan. 2003. The Association between Audit Committee Characteristics and Audit Fees. *Auditing. a Journal of Practice & Theory*, vol. 22 no.2. pp. 17-32.
- Lestari, Puji. 2013. Determinants of Islamic Social Reporting in Syariah Banks: Case of Indonesia. *International Journal of Business and Management Invention*, vol. 2, 10 October, PP.28-34. pp. 30-31.
- Nini dan Estralita Trisnawati. 2009. Auditor Eksternal, Komite Audit dan Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, vol. 11, no.3, Desember, hlm. 175-188. hal. 181, 184.
- Sanjaya, I Putu Sugiarta. 2008. Auditor Eksternal, Komite Audit dan Manajemen Laba. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, vol: 11, no.1, Januari. hal. 97-116.
- Sidharta Utama dan F. Leonardo Z. 2006. Audit Committee Composition, Control of Majority Shareholders and Their Impact on Audit Committee Effectiveness: Indonesia Evidence. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, vol. 9, no.1, Januari. hal. 21-34.
- Yasin, Mahmuddin (Wakil Menteri BUMN). 2012. *23 BUMN Masih Merugi Rp3,236 Triliun. 29 Maret 2012*. Jakarta. Tersedia di <http://bumnwatch.com/23-bumn-masih-merugi-rp3236-triliun/>
- Zaman, Mahbub. 2001. Trunbull-generating undue expectations of the corporate governance role of audit committee. *Managerial auditing journal*, vol: 16, no.1, pp. 5-9.